

Lampiran 5

Peraturan Pemerintah Selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah merupakan bentuk peraturan tertulis yang berlaku umum, yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Substansi materi yang harus diatur dengan peraturan pemerintah berkaitan pengaturan lebih lanjut ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang. Telaah terhadap peraturan pemerintah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kepedulian pemerintah dalam melindungi kepentingan umum yang menjadi fokus perhatian suatu periode pemerintahan.

Peraturan Pemerintah yang ditelaah adalah peraturan pemerintah yang diterbitkan selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, dari periode tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 31 Agustus 2007. Jumlah peraturan pemerintah yang diterbitkan selama periode tersebut sebanyak 187 peraturan pemerintah, yang terdiri dari 2 peraturan pemerintah pada tahun 2004, 80 peraturan pemerintah pada tahun 2005, 55 peraturan pemerintah pada tahun 2006 dan 50 peraturan pemerintah pada tahun 2007.

Pada tahun 2004 peraturan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan politik pemerintahan daerah (Majelis Rakyat Papua) dan perpajakan. Pada tahun 2005, peraturan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan keuangan negara, perpajakan, penyiaran infrastruktur, administrasi negara/ pemerintahan, aparatur negara dan energi. Pada tahun 2006, peraturan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan keuangan negara, pemerintahan daerah, tunjangan aparatur negara, perpajakan, perencanaan pembangunan dan ketentuan tentang BUMN. Peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2007 lebih banyak mengatur tentang pemerintahan, pemerintahan daerah, perpajakan, aparatur negara, olahraga, politik dan sosial ekonomi.

Telaah terhadap peraturan pemerintah didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) relevansi substansi pengaturan peraturan pemerintah dengan upaya pemberdayaan KUKM, (2) signifikansi dampak substansi pengaturan peraturan pemerintah terhadap perkembangan kinerja pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, dan (3) daya guna substansi pengaturan peraturan pemerintah dalam mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUKM di Indonesia. Hasil telaah peraturan pemerintah selama periode tahun 2004-2007 dapat diikuti pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Telaah Pengaturan Peraturan Pemerintah Terhadap KUKM Yang Diterbitkan Periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007

| Tahun | Relevansi | | | | Signifikansi | | | Daya Guna | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | R1 | R2 | R3 | R4 | S1 | S2 | S3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2005 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 18 | 62 | 0 | 0 | 8 | 13 | 59 | 80 |
| 2006 | 0 | 4 | 0 | 51 | 1 | 11 | 43 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | 55 |
| 2007 | 0 | 14 | 0 | 36 | 2 | 17 | 31 | 0 | 2 | 7 | 10 | 31 | 50 |
| Jumlah | 0 | 25 | 0 | 162 | 3 | 46 | 138 | 0 | 3 | 20 | 31 | 133 | 187 |

Relevansi dikaitkan dengan keterkaitan substansi pengaturan dalam peraturan pemerintah dengan pemberdayaan KUMKM, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) peraturan pemerintah yang mengatur langsung KUMKM, sebagai contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; (2) peraturan pemerintah yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM pada masa mendatang, seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Sistem Resi Gudang, dan lain-lain; (3) peraturan pemerintah yang tidak mengatur langsung KUKM, tapi seharusnya dapat diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM, dan (4) peraturan pemerintah yang tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur secara spesifik mengenai KUKM, seperti: Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum.

Dari sisi signifikansi pengaruh peraturan pemerintah terhadap upaya pemberdayaan kinerja telah diidentifikasi sekitar 3 Peraturan Pemerintah yang dinilai mempunyai pengaruh langsung terhadap KUMKM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Tarif PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang berpengaruh terhadap efisiensi KUMKM di bidang perikanan tangkap; Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Ada 46 peraturan pemerintah yang dinilai memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemberdayaan KUMKM terutama yang berkaitan dengan aturan perpajakan, tata pemerintahan, dana perimbangan dan keuangan daerah, infrastruktur, wakaf, penyuluhan, kawasan perdagangan bebas, dan pembagian urusan pemerintahan serta organisasi perangkat daerah. Sisanya, sebanyak 138 peraturan pemerintah (73,8%) dinilai tidak memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap KUMKM.

Beberapa peraturan pemerintah yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kemampuan daerah untuk memberdayakan KUMKM pada masa mendatang, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam memberdayakan KUMKM; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan, yang menempatkan urusan KUMKM sebagai urusan wajib yang harus ditangani oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak pada bentuk dan kapasitas kelembagaan yang dinas yang membidangi KUMKM di daerah; dan (4) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang berdampak terhadap pendekatan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan KUMKM di daerahnya.

Kebijakan yang memiliki daya guna untuk mengubah kinerja KUMKM dalam jangka menengah dan panjang dinilai cukup banyak (20 peraturan pemerintah), yang umumnya terdiri dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang: desain industri, standar nasional pendidikan, kekayaan intelektual, pengelolaan Badan Layanan Umum, infrastruktur, perpajakan, dan kawasan perdagangan bebas. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal khususnya pasal 13 dinilai hanya akan mempertahankan struktur dan pangsa pasar KUMKM, tapi sulit untuk mengembangkan pangsa KUMKM.

Peraturan pemerintah yang dinilai memiliki kemampuan mengubah perilaku pasar KUMKM terdiri dari: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang dinilai dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku KUMKM; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Tabel 2 Hasil Telaah Peraturan Pemerintah Selama Periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005 – Agustus 2007

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|--|-----------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 2004 | PP 54/04 | Majelis Rakyat Papua | 4 | 3 | 5 | Politik | Jasa Pemerintahan |
| | PP 55/04 | Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah | 4 | 3 | 5 | Perpajakan | Lintas sektoral |
| 2005 | PP 01/05 | Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri | 4 | 2 | 3 | Industri | Industri pengolahan |
| | PP 02/05 | Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual | 4 | 2 | 4 | Kekayaan Intelektual | Jasa perusahaan |
| | PP 03/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik | 4 | 3 | 5 | Energi | Listrik |
| | PP 04/05 | Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata | 4 | 3 | 5 | PNBP | Pariwisata |
| | PP 05/05 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan | 4 | 3 | 5 | BUMN | Konstruksi |
| | PP 06/05 | Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | PP 07/05 | Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi BANDING Merek | 4 | 3 | 5 | Kelembagaan Pemerintahan | Perdagangan |
| | PP 08/05 | Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit | 4 | 3 | 5 | Kelembagaan Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 09/05 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 10/05 | Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor | 4 | 3 | 5 | Keuangan | Jasa Keuangan |
| | PP 11/05 | Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik | 4 | 3 | 5 | Penyiaran | |
| | PP 12/05 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Kelembagaan Pemerintahan | |
| | PP 13/05 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Kelembagaan Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 14/05 | Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah | 4 | 2 | 4 | Keuangan Negara | Jasa Keuangan |
| | PP 15/05 | Jalan Tol | 4 | 2 | 3 | Infrastruktur | Konstruksi |
| | PP 16/05 | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2 | 2 | 3 | Infrastruktur | Air bersih |
| | PP 17/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Lasa lainnya |
| | PP 18/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian | 4 | 3 | 5 | Imigrasi | Jasa Pemerintahan |
| | PP 19/05 | Standar Nasional Pendidikan | 4 | 2 | 3 | Pendidikan | Jasa Pendidikan |
| 2005 | PP 20/05 | Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan | 2 | 2 | 3 | Kekayaan Intelektual | Jasa Pendidikan |
| | PP 21/05 | Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik | 4 | 3 | 5 | Lingkungan | Pertanian |
| | PP 22/05 | Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak | 4 | 3 | 5 | Keuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 23/05 | Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 2 | 2 | 3 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 25/05 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan | 4 | 3 | 4 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 26/05 | Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional | 4 | 3 | 5 | Perpajakan | Transportasi |
| | PP 27/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan | 4 | 3 | 5 | PNBP | Transportasi |
| | PP 28/05 | Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika | 4 | 3 | 5 | PNBP | Komunikasi |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | PP 29/05 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 4 | 3 | 5 | Kuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 30/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam | 4 | 3 | 5 | PNBP | lintas sektoral |
| | PP 31/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara | 4 | 3 | 5 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 32/05 | Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa Keuangan |
| | PP 33/05 | Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) | 4 | 3 | 5 | BUMN | lintas sektoral |
| | PP 34/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi | 4 | 3 | 5 | Energi | Pertambangan |
| | PP 35/05 | Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu | 2 | 2 | 3 | Perpajakan | Perdagangan LN |
| | PP 36/05 | Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung | 4 | 3 | 5 | Konstruksi | Konstruksi |
| | PP 37/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4 | 3 | 5 | DPR | Jasa Pemerintahan |
| | PP 38/05 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian | 4 | 3 | 5 | Imigrasi | Jasa Pemerintahan |
| 2005 | PP 39/05 | Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah | 4 | 3 | 5 | Perbankan | Jasa Keuangan |
| | PP 40/05 | Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten | 4 | 3 | 5 | Kelembagaan Pemerintahan | Perdagangan |
| | PP 41/05 | Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah | 4 | 3 | 5 | Perpajakan | Industri Pengolahan |
| | PP 42/05 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | PNBP | Jasa Pemerintahan |
| | PP 43/05 | Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara | 4 | 3 | 5 | BUMN | Lintas sektoral |
| | PP 44/05 | Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas | 4 | 3 | 5 | Kuangan Negara | lintas sektoral |
| | PP 45/05 | Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara | 4 | 3 | 5 | BUMN | lintas sektoral |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikan | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|---|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | PP 46/05 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 47/05 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 48/05 | Pengangkatan Tenaga Honoror Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 49/05 | Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing | 4 | 3 | 5 | Penyiaran | Komunikasi |
| | PP 50/05 | Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta | 4 | 3 | 5 | Penyiaran | Komunikasi |
| | PP 51/05 | Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas | 4 | 3 | 5 | Penyiaran | Komunikasi |
| | PP 52/05 | Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan | 4 | 3 | 5 | Penyiaran | Komunikasi |
| | PP 53/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4 | 3 | 5 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 54/05 | Pinjaman Daerah | 4 | 2 | 3 | Kuangan Negara | Jasa Keuangan |
| | PP 55/05 | Dana Perimbangan | 2 | 2 | 4 | Kuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 56/05 | Sistem Informasi Keuangan Daerah | 4 | 2 | 4 | Kuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 57/05 | Hibah Kepada Daerah | 4 | 2 | 4 | Kuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 58/05 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 2 | 4 | Kuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 59/05 | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| 2005 | PP 60/05 | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh | 4 | 3 | 5 | BUMN | Industri Pengolahan |
| | PP 61/05 | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 62/05 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik | 4 | 3 | 5 | PNBP | Jasa Pemerintahan |
| | PP 63/05 | Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi | 4 | 3 | 5 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 64/05 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 4 | 3 | 5 | Perburuhan | lintas sektoral |
| | PP 65/05 | Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal | 2 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | lintas sektoral |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | PP 66/05 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil | 4 | 3 | 4 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 67/05 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 68/05 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 69/05 | Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya | 4 | 3 | 4 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 70/05 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 71/05 | Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 72/05 | Desa | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 73/05 | Kelurahan | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 74/05 | Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 75/05 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia | 4 | 2 | 4 | PNBP | Jasa Pemerintahan |
| | PP 76/05 | Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara | 4 | 3 | 5 | Kuangan Negara | Jasa Keuangan |
| | PP 77/05 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional | 4 | 3 | 5 | PNBP | Jasa Pemerintahan |
| | PP 78/05 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara | 4 | 3 | 5 | PNBP | |
| | PP 79/05 | Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| 2005 | PP 80/05 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| 2006 | PP 01/06 | Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | 4 | 3 | 5 | Energi | Pertambangan |
| | PP 02/06 | Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri | 4 | 2 | 4 | Kuangan Negara | lintas sektoral |
| | PP 03/06 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang | 4 | 3 | 4 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 04/06 | Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 4 | 3 | 5 | Sosial Masyarakat | Jasa Pemerintahan |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|--|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | PP 05/06 | Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 06/06 | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | 4 | 3 | 4 | Keuangan Negara | Jasa Pemerintahan |
| | PP 07/06 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan | 4 | 3 | 5 | PNBP | Jasa Kesehatan |
| | PP 08/06 | Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah | 4 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 09/06 | Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 4 | 3 | 5 | Kekayaan Intelektual | Jasa Pengembangan |
| | PP 10/06 | Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Dan PT Bank Lippo TBK | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa Keuangan |
| | PP 11/06 | Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara | 4 | 3 | 5 | Perpajakan | Jasa Keuangan |
| | PP 12/06 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah | 4 | 3 | 5 | Perpajakan | Industri Pengolahan |
| | PP 13/06 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 14/06 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 15/06 | Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 16/06 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 17/06 | Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 18/06 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 19/06 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan | 2 | 1 | 3 | PNBP | Perikanan |
| 2006 | PP 20/06 | Irigasi | 4 | 2 | 3 | Infrastruktur | Pertanian |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | PP 21/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 22/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri | 4 | 3 | 5 | BUMN | Pertanian |
| | PP 23/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| | PP 24/06 | Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan | 4 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | Perikanan |
| | PP 25/06 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa pemerintahan |
| | PP 26/06 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik | 4 | 2 | 3 | Energi | Listrik |
| | PP 27/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 28/06 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan | 4 | 3 | 5 | Administrasi Pemerintahan | Jasa pemerintahan |
| | PP 29/06 | Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 30/06 | Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa Pendidikan |
| | PP 31/06 | Sistem Pelatihan Kerja Nasional | 2 | 2 | 2 | Pendidikan | Jasa Pendidikan |
| | PP 32/06 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa Keuangan |
| | PP 33/06 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah | 4 | 2 | 4 | Keuangan Negara | Jasa Keuangan |
| | PP 34/06 | Jalan | 4 | 2 | 3 | Infrastruktur | Transportasi |
| | PP 35/06 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 36/06 | Pencarian Dan Pertolongan | 4 | 3 | 5 | Bencana Alam | Jasa Pemerintahan |
| 2006 | PP 37/06 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 38/06 | Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 39/06 | Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan | 2 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | lintas sektoral |



| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| | PP 40/06 | Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional | 2 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | lintas sektoral |
| | PP 41/06 | Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing | 4 | 3 | 5 | Pendidikan | Jasa lainnya |
| | PP 42/06 | Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | 4 | 2 | 3 | Wakaf | lintas sektoral |
| | PP 43/06 | Perizinan Reaktor Nuklir | 4 | 3 | 5 | Energi | Listrik |
| | PP 44/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| | PP 45/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 46/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 47/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Lecces | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| | PP 48/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa keuangan |
| | PP 49/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara | 4 | 3 | 5 | BUMN | Perikanan |
| | PP 50/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| | PP 51/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| | PP 52/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 53/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang | 4 | 3 | 5 | BUMN | industri pengolahan |
| 2006 | PP 54/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api | 4 | 3 | 5 | BUMN | Transportasi |
| | PP 55/06 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani | 4 | 3 | 5 | BUMN | Pertanian |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikan | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|---|-----------|------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| 2007 | PP 01/07 | Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu | 4 | 2 | 4 | Perpajakan | lintas sektoral |
| | PP 02/07 | Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Kewarganegaraan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 03/07 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat | 4 | 2 | 4 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 04/07 | Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan | 4 | 3 | 5 | PNBP | Jasa Kesehatan |
| | PP 05/07 | Pemindahan Ibu Kota kabupaten Aceh Timur dari Wilayah kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Reyek Kabupaten Aceh Timur | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 06/07 | Tata Hutan dan Peyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan | 2 | 2 | 3 | Administrasi Pemerintahan | Kehutanan |
| | PP 07/07 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai | 2 | 2 | 3 | Perpajakan | lintas sektoral |
| | PP 08/07 | Investasi Pemerintah | 2 | 2 | 3 | Investasi | lintas sektoral |
| | PP 09/07 | Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil | 2 | 2 | 4 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 10/07 | Peraturan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan negara | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 11/07 | Peraturan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 12/07 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomer 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 13/07 | Penetapan pensiun pokok pensiunan pagawai negeri sipil dan janda/dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 14/07 | Penetapan Pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 15/07 | Tata cara perolehan informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja | 2 | 2 | 4 | Administrasi Pemerintahan | lintas sektoral |
| 2007 | PP 16/07 | Penyelenggaraan Keolahragaan | 4 | 3 | 5 | Olahraga | Jasa pengembangan |
| | PP 17/07 | Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 4 | 3 | 5 | Olahraga | Jasa pengembangan |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikan | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|------|----------|---|-----------|------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | PP 18/07 | Pendanaan keolahragaan | 4 | 3 | 5 | Olahraga | Jasa pengembangan |
| | PP 19/07 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia | 4 | 2 | 4 | PNBP | Jasa Pemerintahan |
| | PP 20/07 | Partai Politik Lokal di Aceh | 4 | 3 | 5 | Politik | Jasa Pemerintahan |
| | PP 21/07 | Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 22/07 | Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kalijaga | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 23/07 | Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Hankam | Jasa Pemerintahan |
| | PP 24/07 | Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 25/07 | Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 26/07 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim dan/atau Piatu dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 27/07 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim dan/atau Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 28/07 | Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Vetaran Kepada Veteran Republik Indonesia | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 29/07 | Perubahan keenam atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 30/07 | Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 31/07 | Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomer 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai | 2 | 2 | 3 | Perpajakan | lintas sektoral |
| 2007 | PP 32/07 | Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara | 2 | 2 | 4 | Perpajakan | lintas sektoral |

| Thn | No. | Tentang | Relevansi | Signifikansi | Daya guna | Bidang | Sektor Ekonomi |
|-----|----------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | PP 33/07 | Keselamatan Radiasi Pengion dan Kemanan Sumber Radioaktif | 4 | 3 | 5 | K3L | Jasa Kesehatan |
| | PP 34/07 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam tahun anggaran 2007 kepada Pegawai Negari, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 35/07 | Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi | 4 | 3 | 5 | Teknologi | Jasa Pengembangan |
| | PP 36/07 | Pelaksanaan UU No.9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang | 2 | 1 | 2 | Ekonomi | Pembiayaan |
| | PP 37/07 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan | 4 | 3 | 5 | Administrasi Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 38/07 | Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahn Daerah Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 4 | Pemerintahan daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 39/07 | Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah | 4 | 2 | 4 | Keuangan Negara | Jasa Keuangan |
| | PP 40/07 | Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Berita ANTARA | 4 | 3 | 5 | BUMN | Komunikasi |
| | PP 41/07 | Oraganisasi Perangkat Daerah | 2 | 2 | 4 | Pemerintahan | Jasa Pemerintahan |
| | PP 42/07 | Waralaba | 2 | 1 | 2 | Ekonomi | perdagangan |
| | PP 43/07 | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 44/07 | Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Negara Indonesia TBK | 4 | 3 | 5 | BUMN | Jasa Keuangan |
| | PP 45/07 | Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil | 4 | 3 | 5 | Aparatur | Jasa Pemerintahan |
| | PP 46/07 | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 2 | 2 | 3 | Ekonomi Perdagangan | lintas sektoral |
| | PP 47/07 | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan | 2 | 2 | 3 | Ekonomi Perdagangan | lintas sektoral |
| | PP 48/07 | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun | 2 | 2 | 3 | Ekonomi Perdagangan | lintas sektoral |
| | PP 49/07 | Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur | 4 | 3 | 5 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |
| | PP 50/07 | Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 4 | 2 | 4 | Pemerintahan Daerah | Jasa Pemerintahan |

Keterangan :**Relevansi:**

1. Peraturan mengatur langsung KUKM;
2. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan KUKM di masa mendatang



3. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi seharusnya diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM
4. Peraturan Tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur KUKM

Signifikansi:

1. Peraturan dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM
2. Peraturan dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM
3. Peraturan dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang

Daya Guna:

1. Peraturan mampu mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM
2. Peraturan mampu mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasa KUKM
3. Peraturan mampu mengubah kinerja pasar KUKM
4. Peraturan mampu mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan
5. Peraturan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja KUKM pada masa mendatang